

# BAB I

## PENDAHULUAN

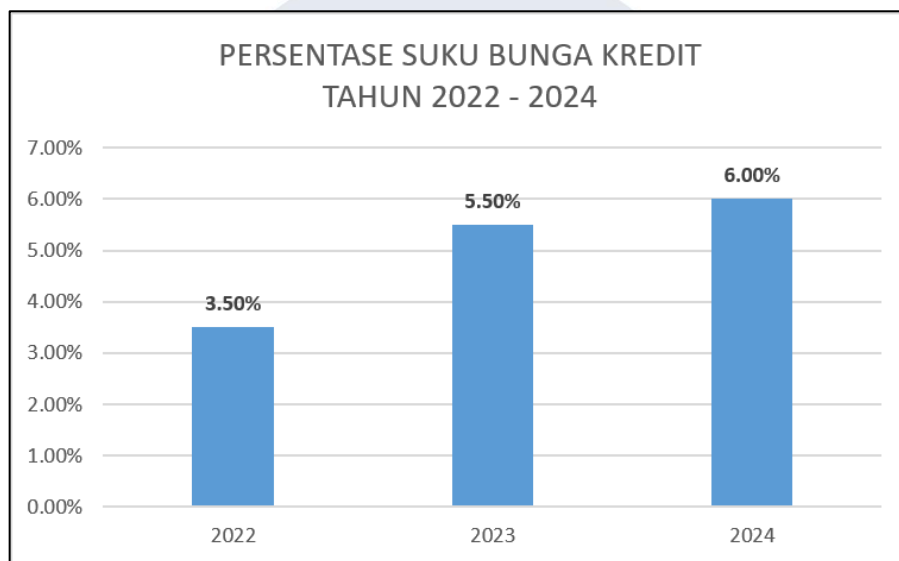
### 1.1 Latar Belakang

Dalam proses mengembangkan perusahaan, seperti meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan kapasitas produksi, pembelian aset baru, hingga ekspansi, perusahaan membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang besar. Adanya kecukupan dana membuat perusahaan lebih fleksibel dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu kebijakan terkait pendanaan penting dalam setiap perusahaan karena berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan yang umum digunakan oleh perusahaan, yaitu pendanaan *internal* dan pendanaan *eksternal*.

Menurut Lubis et al. (2023), “pendanaan *internal* dapat berasal dari saldo laba, dan dana dari aktivitas operasional perusahaan, sedangkan pendanaan *eksternal* dapat berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan”. Perusahaan memilih pendanaan *eksternal* berupa utang karena dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar, menurut Saeful et al. (2025), “utang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan modal kerja, membiayai proyek investasi, atau mengatasi kendala likuiditas”. “Utang juga memberikan manfaat berupa tambahan dana eksternal tanpa kehilangan kontrol atas perusahaan karena tidak perlu menjual saham ke publik. Utang juga membantu mengatur arus kas perusahaan, membuat operasional lebih efektif dan menguntungkan” (Surjadi et al., 2024). Namun menurut Atika (2024), “utang membawa biaya dalam bentuk bunga dan kewajiban pembayaran”. “Utang juga bisa merugikan perusahaan karena reputasi buruk, dan riwayat kredit rusak jika tidak dibayar tepat waktu, dan risiko kehilangan aset jika tidak mampu membayar utang” (Surjadi et al., 2024). Sehingga penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan risiko perusahaan gagal bayar, hingga menyebabkan *financial distress* dan kebangkrutan.

Selain adanya manfaat dan risiko dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, keputusan perusahaan dalam menggunakan pendanaan

berupa utang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, misalnya tingkat suku bunga. Selama tahun 2022-2024 Indonesia masih berada pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19* yang diikuti dengan tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan suku bunga kredit secara konsisten pada tahun 2022-2024. Berikut adalah grafik persentase suku bunga kredit tahun 2022-2024.



Gambar 1.1 Persentase Suku Bunga Kredit Tahun 2022-2024

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (2022-2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat grafik persentase suku bunga kredit *Year on Year (YoY)*. Pada tahun 2022 persentase suku bunga adalah 3,50%, kemudian meningkat menjadi 5,50% pada tahun 2023, dan konsisten mengalami peningkatan menjadi 6,00% pada tahun 2024. Peningkatan suku bunga kredit menyebabkan biaya pinjaman atas utang (*cost of debt*) menjadi tinggi, sehingga dapat mengurangi manfaat penggunaan utang, karena perusahaan harus menanggung beban bunga yang lebih besar, oleh karena itu perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan utang selama suku bunga meningkat, hal ini sejalan dengan pernyataan Klong & Santoso (2025) “suku bunga memengaruhi biaya modal dan keputusan pendanaan perusahaan. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman, sehingga arus kas yang harus

digunakan untuk membayar bunga utang akan menjadi besar, sebaliknya ketika suku bunga rendah maka akan menurunkan beban bunga sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pinjaman untuk ekspansi atau investasi”. Namun ketika terjadi peningkatan suku bunga kredit pada tahun 2022-2024 terdapat beberapa sektor *non-keuangan* yang memiliki tingkat penggunaan utang yang tinggi, yang tercermin dari nilai *Debt To Equity Ratio*, sebagai berikut:

| Tabel <i>DER</i> Per Sektor |                           |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|
| No                          | Sektor                    | DER  |      |      |
|                             |                           | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                           | Infrastructures           | 0.98 | 0.83 | 0.70 |
| 2                           | Energy                    | 0.86 | 0.85 | 0.77 |
| 3                           | Consumer Non-Cyclicals    | 0.84 | 0.78 | 0.82 |
| 4                           | Basic Materials           | 0.81 | 0.63 | 0.55 |
| 5                           | Industrials               | 0.69 | 0.50 | 0.52 |
| 6                           | Consumer Cyclicals        | 0.55 | 0.48 | 0.47 |
| 7                           | Properties & Real Estate  | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| 8                           | Healthcare                | 0.43 | 0.40 | 0.47 |
| 9                           | Technology                | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| 10                          | Transportation & Logistic | 0.24 | 0.40 | 0.57 |

Tabel 1. 1 *Debt To Equity Ratio* Per Sektor Tahun 2022-2024

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat penggunaan utang per sektor tahun 2022-2024 yang tercermin dari *Debt to Equity Ratio (DER)* per sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Pada tabel tersebut setiap sektor memiliki penggunaan utang yang berbeda-beda, dan terdapat 4 sektor yang memiliki nilai *DER* yang tinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu sektor *infrastructure*, *energy*, *consumer non-cyclicals*, dan *basic materials*. Semakin tinggi nilai *DER* maka semakin tinggi proporsi penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitasnya dalam struktur pendanaan perusahaan. Dari ke 4 sektor tersebut terdapat beberapa subsektor dengan nilai *DER* sebagai berikut:

| Tabel DER Subsektor |                        |                                        |             |             |             |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| No                  | Sektor                 | SubSektor                              | DER         |             |             |
|                     |                        |                                        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1                   | Infrastructures        | Transportation Infrastructure          | 0.84        | 0.70        | 0.46        |
| 2                   |                        | Heavy Construction & Civil Engineering | <b>1.20</b> | 0.94        | 0.80        |
| 3                   |                        | Telecommunication                      | <b>1.02</b> | 0.73        | 0.70        |
| 4                   |                        | Utilities                              | 0.58        | 0.79        | 0.64        |
| 5                   | Energy                 | Oil, Gas & Coal                        | 0.88        | 0.83        | 0.77        |
| 6                   |                        | Alternative Energy                     | 0.84        | <b>1.25</b> | <b>1.01</b> |
| 7                   | Consumer Non-Cyclicals | Food and Staples Retailing             | <b>2.00</b> | <b>1.60</b> | <b>1.22</b> |
| 8                   |                        | Food & Beverage                        | 0.89        | 0.78        | 0.82        |
| 9                   |                        | Tobacco                                | 0.52        | 0.44        | 0.49        |
| 10                  |                        | Nondurable Household Products          | 0.80        | 0.56        | 0.52        |
| 11                  | Basic Materials        | Basic Materials                        | 0.81        | 0.63        | 0.55        |

Tabel 1.2 *Debt To Equity Ratio* Per Subsektor Tahun 2022-2024

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa terdapat beberapa subsektor yang memiliki nilai *DER* di atas 1, yaitu *heavy construction & civil engineering* pada tahun 2022, *telecommunication* pada tahun 2022, *alternative energy* pada tahun 2023, dan 2024, dan subsektor *food & staples retailing* yang merupakan satu-satunya sektor yang konsisten memiliki nilai *DER* di atas 1 selama periode 2022-2024, hal ini menunjukkan bahwa subsektor *food & staples retailing* memiliki proporsi penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya selama berturut-turut tahun 2022-2024. Penggunaan utang yang tinggi tersebut diikuti dengan peningkatan total aset subsektor *food & staples retailing*, yaitu sebesar Rp68.211 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp86.009 miliar pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp88.967 miliar pada tahun 2024. Penggunaan utang yang tinggi diikuti dengan peningkatan total aset menandakan bahwa subsektor *food & staples retailing* menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan untuk membiayai asetnya hingga terjadi peningkatan aset.

Kebutuhan penggunaan utang dalam jumlah yang tinggi pada sektor *food & staples retailing*, didukung dengan pernyataan dalam laman berita liputan6.com pada tahun 2022, menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) “akan terjadi ekspansi yang cukup besar di sektor ritel, seiring pulihnya

perekonomian dampak pandemi *covid-19*”. Ketua umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, mengatakan “setelah dua tahun pandemi berlalu, kini sektor ritel mulai berekspansi, misalnya untuk *supermarket* berekspansi hingga 5-6 gerai di tahun 2022 ini, tahun lalu hanya sekitar 2-3 gerai. Sementara untuk *minimarket* tahun lalu hanya berekspansi 600 *minimarket* per 1 perusahaan ritel, tahun ini bisa sampai 800-900 gerai. Lalu untuk *hypermarket* tahun lalu berekspansi 1-2 gerai, tahun ini mencapai 4-5 gerai. Jadi pertumbuhan ritel adalah pertumbuhan dari ekspansi *store*, yang menimbulkan *market* baru, konsumen baru, dan juga produktivitas baru. Untuk itu strategi Aprindo akan berusaha menggandeng kemitraan-kemitraan, baik itu sesama ritel, maupun *marketplace*. Sektor ritel menjadi sektor prioritas karena memberi kontribusi langsung pada PDB”. Selain itu pada tahun 2023 berdasarkan laman berita Kompas.id menyatakan bahwa “penyaluran kredit perbankan nasional tetap tumbuh, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang kuat sehingga memicu permintaan kredit, berdasarkan survei perbankan Bank Indonesia (BI) prioritas utama perbankan adalah penyaluran kredit modal kerja, diikuti kredit investasi, dan kredit konsumsi, pada tahun 2023 sektor yang diprioritaskan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta sektor keuangan”. Lalu berdasarkan laman berita kontan.co.id tahun 2024, menyatakan bahwa menurut Survei Perbankan Bank Indonesia (SPBI), “sektor prioritas penyaluran kredit baik itu kredit investasi dan kredit modal kerja pada tahun 2024 adalah perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan”. Deputy Gubernur BI Junda Agung juga mengungkapkan bahwa “pangsa terbesar kredit perbankan itu banyak didominasi oleh sektor-sektor seperti perdagangan”.

Penggunaan utang dalam jumlah yang besar, dapat digunakan untuk memperoleh aset untuk mendukung kinerja operasional, meningkatkan kapasitas produksi, maupun ekspansi perusahaan, semakin besar utang yang digunakan untuk membiayai aset, maka proporsi aset yang berasal dari utang akan semakin besar, namun hal ini juga menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Apabila perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, sesuai dengan

perjanjian yang ditetapkan, maka akan terjadi risiko gagal bayar, dan dapat menyebabkan *financial distress*, hingga berujung pada kebangkrutan perusahaan, oleh karena itu analisis terkait kebijakan utang penting untuk dilakukan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar utang yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan operasional misalnya untuk membiayai aset dan ekspansi dengan tetap memperhatikan risiko keuangan perusahaan. Selain penting untuk perusahaan, analisis terkait penggunaan utang penting untuk calon kreditur, yang akan meminjamkan uangnya kepada perusahaan, karena akan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan bunga tepat waktu dimasa mendatang sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Perusahaan yang penggunaan utangnya besar, potensi untuk membayar kewajibannya tepat waktu akan berkurang, selain itu juga berpotensi tidak mampu memberikan manfaat berupa keuntungan bagi para kreditur. Oleh karena itu analisis kebijakan utang juga penting dilakukan oleh kreditur untuk mengurangi potensi kerugian.

PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) pada tahun 2023. Berdasarkan laman berita kontan.co.id menyatakan bahwa “tepatnya pada 20 Desember 2023 perusahaan distributor farmasi (SDPC) telah mengakuisisi tanah dan bangunan di Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp44 miliar yang akan dijadikan sebagai pusat pergudangan. Perusahaan membeli lahan seluas 9.436 meter persegi ( $m^2$ ) beserta bangunan dari PT Sinar Elang Sakti Mas, dimana untuk mendanai akuisisi tersebut SDPC menggunakan fasilitas kredit investasi dari Bank Central Asia Tbk (BCA)”. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan keuangan SDPC dimana terjadi peningkatan sebesar Rp44.000.000.000 pada akun liabilitas jangka panjang yaitu utang bank pada tahun 2023, yang sebelumnya pada tahun 2022 tidak terdapat akun liabilitas jangka panjang berupa utang bank (meningkat 100%), berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SDPC pada tahun 2023 dikatakan peningkatan tersebut berasal dari fasilitas kredit investasi “baru” dari Bank BCA yang diberikan pada tanggal 20 Desember 2023 dimana per 31 Desember 2023, fasilitas kredit

investasi tersebut sudah digunakan perusahaan seluruhnya sebesar Rp44.000.000.000. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah SHGB No. 1830, 1832, dan 1833 di Bintarajaya dengan luas masing-masing 469m<sup>2</sup>, 8.510m<sup>2</sup>, dan 457m<sup>2</sup> atas nama PT Sinar Elang Sakti Mas yang akan dibalik nama menjadi atas nama perusahaan (SDPC). Direktur SDPC Mohamad Fazly Hassan mengatakan “penambahan aset ini akan difungsikan sebagai kantor pusat perseroan, gudang pusat (*central warehouse*) dan kantor cabang Bekasi. Hal ini dilakukan karena melihat perkembangan operasi bisnis yang memerlukan perluasan kapasitas gudang pusat. Menurutnya penggabungan kantor pusat, gudang pusat, dan kantor cabang Bekasi dalam satu lokasi dapat meningkatkan efektifitas operasional perseroan”. Atas ekspansi yang dilakukan, SDPC berhasil mengalami peningkatan pendapatan yang semula Rp3.363.517.807.834 pada tahun 2023, menjadi Rp3.916.863.878.530 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 16,45% dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan laporan tahunan SDPC 2024, dikatakan bahwa “peningkatan tersebut hasil dari strategi ekspansi yang sukses, dimana perseroan membuka kantor cabang baru, dan berhasil memperluas jangkauan pasar serta meraih konsumen baru”. Sehingga melalui contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) berhasil menggunakan utangnya untuk membiayai pengadaan aset perusahaan, hingga tercapai peningkatan pendapatan.

Latar belakang dan contoh kasus di atas menunjukkan pentingnya analisis kebijakan utang, atas dasar tersebut dilakukan penelitian terkait pengaruh beberapa faktor terhadap kebijakan utang pada perusahaan subsektor *food & staples retailing*. Kebijakan utang adalah suatu kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk membiayai operasional perusahaannya menggunakan utang sebagai pendanaannya. Selain itu menurut Fitri et al. (2022), “kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan”. Penelitian ini menggunakan kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio*

(*DAR*). Menurut Agnes (2018) dalam Gunawan et al. (2022), mengungkapkan bahwa *Debt to Assets Ratio (DAR)* adalah “*ratio that shows the proportion between liabilities owned and all assets owned*” yang artinya rasio yang menunjukkan proporsi antara total utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini mengharapkan *DAR* yang tinggi, yang artinya semakin tinggi *DAR* maka semakin bergantung perusahaan pada utang untuk membiayai asetnya. Untuk mempertimbangkan kebijakan utang dengan tepat maka ada beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*, antara lain likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan.

Faktor pertama yang berpotensi memengaruhi kebijakan utang adalah likuiditas. Menurut Nuraini et al. (2024), “likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo”. Pada penelitian ini likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio (CR)*. Menurut Weygandt et al. (2022) “*current ratio* adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya”. Tingginya nilai *CR* menandakan bahwa perusahaan mampu melunasi liabilitas lancarnya menggunakan aset lancar yang dimilikinya, ditandai dengan aset lancar yang lebih tinggi dibandingkan liabilitas lancarnya, yang menandakan perusahaan memiliki modal kerja tinggi, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi penilaian kredit yang tercermin dalam POJK No.40/POJK.03/2019, yaitu likuiditas dan modal kerja yang kuat. Terpenuhinya penilaian kredit tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu untuk membayar utang dan bunganya, sehingga menjadi dasar bagi kreditur untuk memberikan pinjaman ke perusahaan. Dana yang diperoleh dari kreditur yaitu liabilitas jangka panjang berupa utang bank dapat digunakan oleh perusahaan *food & staples retailing* untuk membangun gudang dengan kapasitas yang besar sehingga aset yang dibiayai utang akan tinggi dan kebijakan utang akan meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Elisabeth (2024) yang menghasilkan kesimpulan bahwa “likuiditas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang”. Namun tidak sejalan dengan penelitian penelitian Tarigan et al. (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa “likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kebijakan utang” dan penelitian Hikmawati & Meidiyustiani (2023) yang menyatakan “*current ratio* tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang”.

Faktor kedua yang berpotensi memengaruhi kebijakan utang yaitu kepemilikan institusional. Brigham (2005) dalam Kartikasari et al. (2022), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional adalah “kepemilikan investasi saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti: perusahaan, dana pensiun, dan lain-lain dalam jumlah yang besar”. “Kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan antara jumlah saham institusional dengan jumlah saham beredar” (Abdurrosyid & Damayanti, 2023). Kepemilikan Institusional yang tinggi artinya semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi, karena memiliki proporsi yang tinggi pihak institusi memiliki pengaruh signifikan sampai dengan mengendalikan, sehingga pihak institusi dapat mendorong perusahaan untuk mengelola aset dengan lebih efektif, misalnya pihak institusi memberikan akses bersama penggunaan gudang miliknya yang berstandar tinggi dan tersertifikasi ke perusahaan dengan biaya sewa yang lebih murah. Dengan penambahan gudang yang berstandar tinggi dan tersertifikasi kualitas persediaan yang disimpan pada gudang terjaga, selain itu kapasitas penyimpanan juga meningkat sehingga dapat memperluas kerjasama dengan lebih banyak *supplier*. Sehingga adanya dukungan dari pihak institusi menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi penilaian kredit yang tercermin dalam POJK No.40/POJK.03/2019, yaitu perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha, sehingga terpenuhinya penilaian kredit menjadi dasar bagi kreditur untuk memberikan pinjaman ke perusahaan. Pada perusahaan *food & staples retailing* pinjaman yang diberikan yaitu berupa utang usaha melalui kontrak distribusi dari *supplier*, sehingga perusahaan memperoleh persediaan untuk menyediakan produk ke pelanggan. Dengan demikian aset yang dibiayai utang akan tinggi, dan kebijakan utang meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kartikasari et al. (2022), yang menghasilkan

kesimpulan bahwa “kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan utang yang dihitung dengan rasio *Debt to Asset Ratio (DAR)*”. Namun tidak sejalan dengan penelitian Yospan & Junaidi (2021) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang.

Faktor terakhir yang berpotensi mempengaruhi kebijakan utang yaitu ukuran perusahaan. Menurut buku manajemen keuangan Hartati (2024) mengungkapkan bahwa “ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, termasuk ukuran logaritma dari total aset, total penjualan, dan lain-lain”. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total penjualan yang dimiliki perusahaan tersebut. Tingginya total penjualan menandakan perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjual produknya ke pelanggan. Misalnya dengan memiliki gerai di berbagai wilayah strategis maka semakin banyak pelanggan yang dapat dijangkau dan dilayani, sehingga akan semakin banyak produk yang dapat terjual, selain itu tingginya total penjualan yang berkelanjutan juga menandakan bahwa permintaan pelanggan terhadap produk yang dijual oleh perusahaan stabil, dengan demikian perusahaan telah memenuhi penilaian kredit yang tercermin dalam POJK No.40/POJK.03/2019, yaitu pendapatan yang tumbuh dan pasar yang stabil, sehingga terpenuhinya penilaian kredit ini menjadi dasar bagi kreditur untuk memberikan pinjaman ke perusahaan. Pada perusahaan *food & staples retailing* pinjaman yang diberikan, yaitu liabilitas sewa, sehingga perusahaan memperoleh aset hak guna, misalnya berupa gerai yang digunakan untuk menjalankan kegiatan penjualan ritel dan mendistribusikan produk ke pelanggan. Dengan demikian aset yang dibiayai utang akan tinggi, dan kebijakan utang meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Chatterjee & Eyigungor (2022), menghasilkan kesimpulan bahwa “*firm size (ln sales)* berpengaruh positif signifikan terhadap *leverage (DAR)*”. Sedangkan dalam penelitian Rifiana et al. (2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*ln sales*) tidak berpengaruh terhadap *DAR*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Daryanti (2023) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu likuiditas yang mengacu pada penelitian Tarigan et al. (2022), dan kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian (Kartikasari et al., 2022).
2. Penelitian ini tidak menguji kembali variabel independen profitabilitas dan kepemilikan manajerial karena dalam hasil penelitian sebelumnya, variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan utang.
3. Penelitian ini mengganti proksi variabel independen ukuran perusahaan yaitu logaritma natural total aset menjadi logaritma natural total penjualan.
4. Penelitian ini menggunakan objek yaitu perusahaan subsektor *food & staples retailing* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, ditetapkan judul dalam penelitian ini sebagai berikut: **“PENGARUH LIKUIDITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor *food & staples retailing* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan utang dengan proksi *Debt to Assets Ratio (DAR)*.
2. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas pada likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, kepemilikan institusional, dan

ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan.

3. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan subsektor *food & staples retailing* yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio (CR)* berpengaruh positif terhadap kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*?
3. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio (CR)* terhadap kebijakan utang.
2. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang.
3. Pengaruh positif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan terhadap kebijakan utang.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan terutama pada perusahaan subsektor *food & staples retailing* agar dapat mempertimbangkan, dan menetapkan kebijakan utang dengan

tepat setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang.

2. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kreditur dalam membuat keputusan untuk memberikan pinjaman kepada debitur dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, dan kondisi perusahaan.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor agar dapat menilai kondisi perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan utang sebelum berinvestasi.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait kebijakan utang agar dapat dijadikan sumber dan referensi dimasa yang akan datang sehingga bisa melengkapi penelitian ini.

5. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti agar dapat mengetahui pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan penelitian ini, dimana terbagi kedalam 5 bab, sebagai berikut:

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

“Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan”.

### **BAB II                    LANDASAN TEORI**

“Pada bab ini membahas kajian teori yang terdiri dari kebijakan utang yang diproksikan dengan *Debt to Assets*

*Ratio (DAR)* sebagai variabel dependen, teori-teori variabel independen yaitu likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan, hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian”.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

“Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yang sesuai dengan kriteria teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yaitu multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas, dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda, koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji statistik t”.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

“Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan, yakni pengumpulan data, hasil pengujian beserta analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian”.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

“Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, saran dan implikasi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan”.